

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Chiang Mai Initiative Multilateralism (CMIM) merupakan sebuah dana moneter Asia yang mulai berlaku sejak hari Rabu 24 Maret 2010, hal tersebut diumumkan oleh Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral negara-negara anggota ASEAN, Cina, Jepang, Korea Selatan, dan Otoritas Keuangan Hong Kong Cina. Resminya keberadaan CMIM ini sejak adanya penandatanganan perjanjian CMIM oleh para Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral negara-negara ASEAN, Cina, Jepang, dan Korea Selatan serta Otoritas Moneter Hong Kong Cina, pada akhir Desember 2009. CMIM merupakan fasilitas bantuan keuangan dengan jumlah dana sebesar USD 120 milyar. Tujuan utama terbentuknya CMIM ini antara lain adalah untuk menanggulangi kesulitan neraca pembayaran dan likuiditas jangka pendek di kawasan dan untuk melengkapi perjanjian keuangan internasional yang sudah ada. Pola kerja dari dana moneter Asia ini adalah CMIM akan menyediakan bantuan keuangan melalui transaksi swap<sup>1</sup> mata uang antara para anggota dalam CMIM pada saat likuiditas<sup>2</sup> dibutuhkan.<sup>3</sup> Setiap anggota dalam CMIM mempunyai hak untuk menukar mata uangnya dengan dollar Amerika sejumlah kontribusinya dalam CMIM kemudian

---

<sup>1</sup> Transaksi pertukaran dua valuta asing melalui pembelian tunai dengan penjualan kembali secara berjangka, atau penjualan tunai dengan pembelian kembali secara berjangka.

<sup>2</sup> Kewajiban seseorang atau perusahaan untuk memenuhi kewajiban atau hutang yang harus segera dibayarkan dalam jangka pendek.

<sup>3</sup> PR. Wire, "Berlakunya Chiang Mai Initiative Multilateralism (CMIM)," *Antara News*, Maret 25, 2010, diakses pada Maret 23, 2015, <http://www.antaraneews.com/berita/179450/berlakunya-chiang-mai-initiative-multilateralization-cmim>.

dikalikan dengan angka pengganda pembeliannya sesuai dalam perjanjian yang telah disepakati bersama.<sup>4</sup>

Terwujudnya integrasi finansial kawasan dalam CMIM memiliki sejarah yang cukup panjang. Berawal dari pasca terjadinya krisis finansial Asia pada tahun 1997-1998, kerjasama ekonomi Cina dengan negara-negara kawasan Asia Timur-Tenggara<sup>5</sup> mengalami kemajuan dibandingkan sebelumnya, saat sebelum terjadi krisis Cina menunjuknya ketidak tertarikannya untuk melakukan kerjasama ekonomi dalam tingkatan regional. Kerjasama ekonomi di kawasan Asia Timur sendiri memang sangat tertinggal jauh dibandingkan dengan kawasan yang lain, dikarenakan sejarah kawasan Asia Timur yang dahulunya penuh dengan konflik regional dan ambisi penguasaan, seperti perang saudara Korea Utara dan Korea Selatan, ambisi *One China* yang mempengaruhi kebijakan Cina dalam mengambil tindakan dengan Tibet dan Taiwan serta membuat terbentuknya negara-negara SAR (*Special Administration Region*) yang menerapkan sistem negara *One Country 2 System* seperti Hongkong dan Macau, serta kompetisi antara Cina dan Jepang untuk menjadi *leading state* di kawasan Asia Timur. Hal-hal tersebut yang kemudian memunculkan ketakutan negara-negara Asia Timur untuk bergabung dalam suatu organisasi yang terintegrasi secara penuh dan negara-negara tersebut

---

<sup>4</sup> Biro Humas Kemenkeu RI, "Berlakunya Chiang Mai Initiative Multilateralism (CMIM)," *SIARAN PERS*, Maret 24, 2010, diakses pada Maret 23, 2015, [http://www.kemenkeu.go.id/sites/default/files/siaran\\_pers/cmim\\_ind.pdf](http://www.kemenkeu.go.id/sites/default/files/siaran_pers/cmim_ind.pdf).

<sup>5</sup> Dalam skripsi ini yang dimaksud dengan Asia Timur-Tenggara mengacu pada pengelompokan negara-negara yang terdiri dari 10 negara anggota *Association of Southeast Asian Nations* (ASEAN) – Brunei, Kamboja, Indonesia, Laos, Malaysia, Myanmar, Filipina, Singapura, Thailand dan Vietnam- ditambah Cina (termasuk Daerah Administratif Khusus Hongkong), Jepang, dan Korea Selatan.

pun lebih memilih bekerjasama secara bilateral.<sup>6</sup> Namun krisis finansial 1997 telah membuat kemajuan besar dalam kerjasama ekonomi tingkat regional Asia Timur bersama dengan negara di Asia Tenggara. Negara kawasan Asia Timur-Tenggara secara aktif mendorong terciptanya kerjasama ekonomi regional.

Sebelum krisis, kerjasama ekonomi di Asia Timur-Tenggara dilakukan oleh pelaku bisnis swasta antara kedua kawasan Asia Timur dan Asia Tenggara, hal tersebut karena pemerintah negara Asia Timur menunjukkan sedikit minat dalam kerja sama ekonomi regional. Pasca krisis negara kawasan Asia Timur mulai mau bekerjasama secara regional, dimulai pada Desember 1997, *Association of Southeast Asian Nations* (ASEAN) bersama Cina, Jepang, dan Korea Selatan mendirikan ASEAN Plus Three (APT) sebagai sebuah forum kerjasama antar negara-negara yang tergabung, kemudian APT terinstitusionalisasi di tahun 1999.<sup>7</sup> Dalam kerangka kerjasama APT, Cina bersama negara anggota lainnya telah melakukan tinjauan ekonomi tahunan, dialog kebijakan, pengembangan pasar obligasi regional, dan juga mendirikan lembaga penelitian khusus yang bertujuan mencari cara untuk memperkuat kerjasama finansial dan meningkatkan stabilitas finansial kawasan, agar krisis tidak kembali terulang.

Kerangka APT yang melibatkan Jepang, Cina, dan Korea Selatan merupakan salah satu perwujudan pentingnya kerjasama kawasan di era

<sup>6</sup> John Ravenhill, *East Asian regionalism: Much ado about nothing?* (Canberra: Department of International Relations RSPAS College of Asia and the Pacific Australian National University, 2008), 27-28.

<sup>7</sup> Hyoung-kyu Chey, "The Changing Political Dynamics of East Asian Financial Cooperation: The Chiang Mai Initiative," *Asian Survey* 49, no. 3 (Mei/Juni 2009): 451, <http://www.jstor.org/stable/10.1525/as.2009.49.3.450> (diakses November 10, 2014).

interdependensi ekonomi di mana terbentuknya kerjasama ini sangat dipengaruhi oleh krisis pada saat itu. Pertemuan antara negara-negara ASEAN dengan tiga mitranya Jepang, Cina, Korea Selatan untuk pertama kalinya dilakukan pada Desember 1997 di Kuala Lumpur namun pada pertemuan ini belum bisa menghasilkan suatu keputusan yang signifikan. Pertemuan kedua akhirnya dilaksanakan pada Desember 1998 di Hanoi, Vietnam, dan dalam pertemuan kali ini Cina menyarankan agar diadakan forum rutin antar deputi keuangan dari negara APT untuk mendiskusikan isu-isu finansial.<sup>8</sup> Saran dari Cina tersebut mulai menandai ada sedikit perubahan sikap Cina dalam hal kerjasama finansial setelah sebelumnya tidak mendukung pembentukan *Asian Monetary Fund* (AMF) atau pun terlibat secara aktif dalam kerangka kerjasama regional pasca Perang Dingin.

AMF merupakan sebuah badan finansial regional yang diusulkan oleh Jepang di tahun 1997 yang memungkinkan penanggulangan krisis dengan cara menyediakan bantuan likuiditas. Namun AMF tidak berhasil terbentuk, karena proposal yang diajukan oleh Jepang ini kurang mendapat dukungan dari IMF dan Amerika Serikat ditambah lagi Cina juga menolak proposal tersebut. Penolakan dari IMF dan AS tidak masalah bagi Jepang, namun dengan tidak adanya dukungan dari Cina, semua upaya pembentukan AMF menjadi tidak mungkin lagi, Cina merupakan negara yang sangat diharapkan Jepang untuk mendukung proposal ini. Cina merupakan mitra terbaik Jepang untuk mewujudkan institusi regional yang dapat diterima oleh negara-negara lain dan memiliki *power* cukup di kawasan. Dengan dukungan dari Cina maka AMF dapat tetap berjalan. Alasan

---

<sup>8</sup> Shigekho Hayashi, *Japan and East Asian monetary regionalism: Towards a proactive leadership role?* (New York: Routledge, 2006), 109.

Cina menolak proposal tersebut adalah karena Cina melihat adanya risiko atas mata uangnya jika lembaga atau institusi finansial regional berhasil terbentuk, yang berarti bahwa Cina siap mempertaruhkan cadangan mata uangnya demi negara-negara di Asia Tenggara khususnya.<sup>9</sup>

Kembali pada usulan yang disampaikan oleh Cina pada pertemuan kedua APT di Hanoi 1998, ASEAN menanggapi secara positif usulan Cina untuk mengadakan forum pertemuan rutin antara deputy keuangan dari negara APT, yang kemudian dilaksanakan pada Maret 1999, disusul oleh pertemuan para menteri keuangan pada April 1999. Pada tahun yang sama di bulan November diadakan pertemuan ketiga antara negara APT dengan bahasan yang masih sama yakni integrasi finansial regional.<sup>10</sup> Di tahun 2000 pada bulan Maret, diadakan kembali pertemuan para deputy keuangan negara APT untuk menindak lanjuti hal-hal yang telah dibahas dalam pertemuan ketiga APT di bulan November 1999, yang akhirnya menghasilkan keputusan bahwa para deputy keuangan setuju untuk mempertimbangkan kerangka kerja yang lebih konkret dalam hal finansial untuk menanggulangi krisis di masa depan. Pada Mei tahun 2000, APT dalam *ASEAN Plus Three Finance Minister Meeting* (APT-FMM) telah melihat pentingnya membangun kerangka kerjasama finansial kawasan sebagai suatu upaya penanggulangan krisis yang cepat dan mandiri, sehingga merumuskan kerangka pembentukan bantuan dana bilateral yang diberi nama *Chiang Mai Initiative* (CMI) yang merupakan sekumpulan bilateral swap agreements (BSAs) antara

---

<sup>9</sup> Green 2011, dalam Ratus Jill, *Japan, china and networked regionalism in East Asia* (New York: Palgrave Macmillan, 2011), 104.

<sup>10</sup> Shigekho Hayashi, *Japan and East Asian monetary regionalism: Towards a proactive leadership role?* (New York: Routledge, 2006), 113.

negara ASEAN, Cina, Jepang, dan Korea Selatan. Namun, seiring berjalannya waktu Cina merasa bahwa jika kerangka tersebut hanya bersifat bilateral akan sulit untuk penanganan krisis yang kemudian, Cina mulai mendorong pembentukan kerangka kerjasama yang lebih terintegrasi secara multilateral. Usaha Cina akhirnya berhasil dan *Chiang Mai Initiative* dimultilateralisasi menjadi *Chiang Mai Initiatives Multilateralism* di tahun 2009 dan ditanda tangani oleh seluruh negara ASEAN, Cina, Jepang, dan Korea Selatan, ditambah otoritas keuangan Hingkong Cina dengan fungsi sebagai penyedia bantuan likuiditas mandiri bagi negara-negara anggota APT.<sup>11</sup>

Sejak Maret 2010 CMIM secara resmi telah berjalan menjadi rezim finansial satu-satunya dengan sistem likuiditas yang telah disepakati oleh negara-negara APT. Bank Cina dan Jepang menjadi kontributor terbesar dalam CMIM. Hal ini menjadi menarik ketika melihat perilaku Cina yang secara signifikan menjadi sangat pro aktif dalam upaya pembentukan integrasi finansial kawasan di mana sebelumnya Cina menunjukkan ketidak tertarikan terhadap segala bentuk kerjasama finansial yang bersifat multilateral. Penolakan Cina terhadap AMF sebelumnya dikarenakan kekhawatiran Cina akan cadangan mata uangnya yang harus dipertaruhkan untuk negara-negara APT khususnya Asia Tenggara, namun dalam CMIM pun Cina tetap harus mempertaruhkan cadangan mata uangnya karena bentuk CMIM dan AMF memiliki kesamaan yakni sebuah lembaga yang menyediakan sistem likuiditas yang berfungsi sebagai penyedia bantuan apabila terjadi krisis di masa mendatang atau sebuah dana moneter Asia. Perubahan sikap

---

<sup>11</sup> Hyoung-kyu Chey, "The Changing Political Dynamics of East Asian Financial Cooperation: The Chiang Mai Initiative," *Asian Survey* 49, no. 3 (Mei/Juni 2009): 451-452, <http://www.jstor.org/stable/10.1525/as.2009.49.3.450> (diakses November 10, 2014).

Cina ini mengindikasikan bahwa terdapat sesuatu yang mendorong Cina untuk merubah pemikirannya terhadap integrasi finansial kawasan. Faktor pendorong perubahan sikap Cina inilah yang kemudian diteliti dalam skripsi ini.

## 1.2 Rumusan Masalah

Untuk memudahkan dalam menganalisis permasalahan dalam penelitian ini, maka berdasarkan penjabaran latar belakang sebelumnya, dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

Apa yang mendorong Cina mendukung *Chiang Mai Initiative Multilateralism*?

## 1.3 Kerangka Pemikiran

Untuk menjelaskan alasan dibalik dukungan Cina terhadap CMIM maka dibutuhkan konsep dan/atau teori untuk mendapatkan jawaban yang logis dari penelitian ini. Oleh karena itu dalam sub bab ini akan dijelaskan beberapa teori dan konsep yang saling relevan. Dikarenakan bentuk dari rezim CMIM ini adalah perjanjian regional terkait finansial ekonomi maka perlu dipahami terlebih dahulu tentang keterkaitan antara konsep regionalisme dan kepentingan nasional dengan stabilisasi finansial.

### 1.3.1 Regionalisme dan Upaya Stabilisasi Finansial

Terbentuknya suatu perjanjian finansial kawasan dan *regional financial arrangements* yang telah disepakati biasanya merupakan upaya regional terkait penanganan krisis finansial secara mandiri, sekaligus sebagai aturan untuk

menjaga kestabilan dan kesinambungan finansial di kawasan. Munculnya satu krisis finansial menjadi ancaman bagi banyak negara oleh karena itu adanya perjanjian finansial merupakan solusi untuk mengatasi masalah tersebut.<sup>12</sup> Hal ini diakibatkan adanya interdependensi serta *interconnectedness* tinggi yang merupakan hasil dari globalisasi, sehingga menciptakan dunia sebagai ruang penuh titik yang mana satu sama lainnya saling mempengaruhi.<sup>13</sup> Kajian Keohane dan Nye menemukan bahwa dunia saat ini memang begitu kompleks, dan salah satu karakteristik utamanya adalah menurunnya kekuasaan militer dan berganti dengan isu ekonomi yang termanifestasi dalam perdagangan bebas.<sup>14</sup> Hal inilah yang menjadi dasar mengapa sebuah krisis ekonomi sangat rentan pada efek multiplikasi atau perluasan, sebab ekonomi telah menjadi faktor dominan di area saling ketergantungan dunia. Dilihat dari angka pendapatan yang diperoleh dari adanya investasi luar negeri, perusahaan multinasional, ekspor-impor, maka sebuah negara akan sangat terpengaruh oleh suatu guncangan kestabilan perekonomian negara lain, terlebih jika kedua negara tersebut memang adalah partner bisnis utama.

Menurut Hyman P. Minsky krisis finansial adalah ciri melekat dan tak dapat dihindari dalam sistem kapitalis dan sebenarnya terlihat jelas dan dapat diperkirakan.<sup>15</sup> Minsky berpandangan bahwa sumber dari instabilitas adalah

<sup>12</sup> Badan Kebijakan Fiskal, 2014, *INTEGRASI CMIM dan AMRO: menuju Regional Financial Arrangement di kawasan ASEAN + 3*, <http://www.fiskal.depkeu.go.id/2010/m/edef-konten-view-mobile.asp?id=20141229104951108689214>

<sup>13</sup> Budi Winarno, *Isu-isu Global Kontemporer*. (Yogyakarta: CAPS, 2011), 98.

<sup>14</sup> Robert O Keohane dan Joseph S Nye, *Power and Interdependence: World Politics in Transition*, (Boston: Little, Brown and Company (Inc), 1977).

<sup>15</sup> Robert Gilpin dan Jean Millis Gilpin, *The Challenge of Global Capitalism: The World Economy 21st Century*, (Princeton NJ: Princeton University Press, 2002), 141.



stabilitas itu sendiri, “*stability is destabilizing*”. Karena saat kondisi ekonomi berlangsung stabil, para pelaku ekonomi cenderung berperilaku ekspansif dan kurang berhati-hati dalam berhutang. Hal ini mendorong timbulnya perilaku spekulatif karena keputusan-keputusan yang mereka buat dipengaruhi oleh harapan-harapan di masa depan, sedangkan masa depan adalah sesuatu yang tidak pasti. Semakin berkembang perilaku spekulatif dalam ekonomi akhirnya membawa pada instabilitas. Pada 1974, Minsky telah mengembangkan model sederhana untuk memahami risiko finansial di mana perkembangan struktur utang di tingkat perusahaan, yang umumnya meningkat saat terjadi *economic boom*, menjadi faktor penentu utama bagi rangkaian krisis finansial.<sup>16</sup> *Economic boom* adalah situasi di mana tingkat investasi yang tinggi menciptakan sikap optimistis dan terlalu berani dalam mengambil risiko serta meningkatnya perilaku spekulatif di kalangan para pelaku ekonomi. Kondisi ini disertai dengan semakin bertambahnya penyaluran kredit pada sektor-sektor ekonomi tertentu.

Sedangkan konsep regionalisme menurut pendapat Kalevi Jaakko Holsti dan Hans Joachim Morgenthau merujuk bahwa suatu kawasan didefinisikan sebagai sekumpulan negara yang memiliki kedekatan geografis dan struktur masyarakat karena berada pada satu wilayah tertentu. Dengan adanya kebutuhan dalam memenuhi kepentingan nasional dalam hal sumber daya maka interdependensi menjadi sebuah kecenderungan yang tidak dapat dipisahkan antar negara satu kawasan. Dari sinilah muncul sebuah keinginan bersama yang terdapat dalam satu region untuk dapat menyelesaikan isu-isu yang bisa mengganggu stabilitas di kawasan. Begitu juga yang terjadi dalam isu finansial

---

<sup>16</sup> Agustinus Prasetyantoko, *Bencana Finansial; Stabilitas sebagai Barang Publik*, (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2008), 89.

Asia Timur-Tenggara.<sup>17</sup> Menurut Marry Farrel terdapat dua premis dasar untuk memahami regionalisme, pertama, regionalisme dipandang sebagai tanggapan terhadap globalisasi dan juga suatu reaksi terhadap aspek-aspek yang sangat beragam dari proses globalisasi. Kedua, regionalisme dipandang sebagai produk dari dinamika internal dari suatu kawasan.<sup>18</sup> Menurut Lamberte, regionalisme mengacu pada kerjasama ekonomi formal dan pengaturan ekonomi dari sekelompok negara yang bertujuan untuk memfasilitasi atau meningkatkan integrasi regional.<sup>19</sup> Berdasarkan penjelasan tersebut maka, regionalisme ekonomi kira-kira dapat dipahami sebagai, (a) langkah-langkah kerjasama ekonomi formal, (b) dilakukan oleh pemerintah, (c) memfasilitasi integrasi ekonomi regional, (d) terbatas pada wilayah geografis.

Dalam melihat bagaimana upaya regionalisme dalam menangani krisis finansial, penulis melakukan studi pustaka dan menemukan bagaimana upaya Uni Eropa yang merupakan pelopor dari regionalisme di dunia menangani krisis finansial yang terjadi di Spanyol di tahun 2008-2009. Dalam menangani krisis finansial Spanyol, Uni Eropa mengaktualisasikan peran dan fungsinya sebagai *International Government Organization* yakni sebagai (1) sarana atau instrumen bagi para petinggi Uni Eropa untuk mencapai kesepakatan bersama untuk memberi bantuan finansial kepada Spanyol, (2) menjalankan fungsi operasional melalui EFSF atau *European Financial Stability Facility* dan ESM atau *European*

<sup>17</sup> Craig A Synder, *Contemporary security and Strategy*, (Macmillan: Palgrave, 2008), 228.

<sup>18</sup> Marry Farrel, "The Global Politics of Regionalism: An Introduction", dalam Marry Farrel dan Bjorn Hettne (eds), *Global Politics of Regionalism*, (London: Pluto Press, 2005), 120.

<sup>19</sup> Mario B. Lamberte, "An Overview of Economic Cooperation and Integration in Asia" dalam *Asian Development Bank, Asian Economic Cooperation and Integration: Progress, Prospects, and Challenges*, (Manila: Asian Development Bank, 2005), 4.

*Stability Mechanism* dalam penyediaan bantuan finansial bagi Spanyol, (3) menjalankan fungsi pembuatan aturan atau *rulemaking* terhadap Spanyol dalam skema penerimaan bantuan finansial, (4) melaksanakan sejumlah upaya di tingkat regional untuk menyelesaikan krisis finansial di zona euro di mana Spanyol termasuk di dalamnya. Dalam memberikan bantuan finansial kepada Spanyol, Uni Eropa mengoperasionalkan EFSF dan ESM sebagai sumber dari dana yang diberikan kepada Spanyol. Pendirian kedua lembaga tersebut sama-sama bertujuan untuk memelihara stabilitas finansial EMU atau *European Monetary Union* dengan menyediakan bantuan finansial sementara bagi negara anggota zona euro yang sistem finansialnya mengalami masalah dan memerlukan bantuan. Uni Eropa juga melakukan beberapa upaya pada tingkat regional dengan merumuskan berbagai gagasan jangka panjang seperti *Eurobonds*, Uni Perbankan, integrasi fiskal dan penandatanganan disiplin fiskal baru yaitu *The Fiscal Stability Treaty* serta pembelian obligasi oleh Bank Sentral Eropa untuk mengembalikan stabilitas finansial dan ekonomi di kawasan zona euro termasuk Spanyol.

Dalam studi pustaka lainnya, Pradumna B. Rana, seorang Direktur Pengawasan Ekonomi Regional ADB memberikan pandangan bahwa kerjasama finansial regional akan menciptakan *win-win situation*. Karena, seluruh anggota yang terlibat mendapat kesempatan yang sama untuk meningkatkan kerjasama dalam bidang perdagangan maupun investasi.<sup>20</sup> Hubungan negara-negara di kawasan Asia Timur-Tenggara jika berkaca pada krisis keuangan 1997-1998 menegaskan bahwa antar negara di kawasan memiliki saling ketergantungan yang

---

<sup>20</sup> Pradumna B. Rana, "Monetary and Financial Cooperation in East Asia: The Chiang Mai Initiative and Beyond", *Asian Development Bank Working Paper Series*, No. 6, (Februari 2002) <http://www.hkpec.org/files/f37.pdf> (diakses Juli 20, 2015).

tinggi melalui perdagangan, keuangan, keterkaitan ekonomi makro, dan hubungan ekonomi penting lainnya. Krisis finansial yang awalnya terjadi di Thailand bisa sangat cepat menyebar di negara kawasan. Dan untuk menanggulangi krisis tersebut di masa yang akan datang, Tadahiro Asami memaparkan bahwa CMI merupakan simbol dari kerjasama finansial regional Asia yang diperuntukkan khusus tentang finansial. Kesepakatan awal CMI meliputi, pertama, CMI merupakan cadangan dana yang berasal dari ASEAN *Swap Arrangement* (ASA) dan jaringan bilateral swap. Kedua, apabila ada negara yang ingin menarik sejumlah dana, maka negara tersebut harus menegosiasikan secara individu ke negara anggota lainnya. Ketiga, jangka waktu swap adalah tiga bulan, dan dapat dilakukan enam kali dalam kurun waktu dua tahun. Keempat, mata uang yang dipakai dalam swap adalah Dollar Amerika terhadap mata uang lokal masing-masing negara. Kelima, pencairan dana tidak melebihi sepuluh persen dan sembilan puluh persen lainnya akan didapatkan apabila negara yang meminjam menyepakati program IMF.<sup>21</sup>

Menurut pendapat Rourke, kerjasama adalah suatu proses terjalinnya hubungan bilateral maupun multilateral antara negara dengan negara maupun negara dengan organisasi internasional.<sup>22</sup> Kerjasama dapat dilakukan dalam berbagai bidang, antara lain ekonomi, politik, keamanan, dan sosial budaya. Meskipun demikian, kerjasama dibidang ekonomi selalu berjalan lebih cepat. Hal ini karena kepentingan ekonomi sering menjadi motif utama sebuah kerjasama

---

<sup>21</sup> Tadahiro Asami, "Chiang Mai Initiative as the Foundation of Financial Stability", (Maret 2005), <http://www.aseansec.org/17905.pdf> (diakses Juli 20, 2015).

<sup>22</sup> John T. Rourke, "International Economic Cooperation: the Alternative Road", dalam *International Politics on the World Stage tenth edition*, (New York: Mc Graw hill, 2004), 466.

antar negara. Kerjasama ekonomi lebih memungkinkan setiap negara bersedia berkompromi untuk memperoleh keuntungan terbaik bagi masing-masing negara. Intensitas kerjasama akan menghasilkan *interdependence*, yaitu situasi yang menggambarkan adanya suatu kerjasama antar negara dan antar aktor dari berbagai negara dalam satu kawasan maupun lebih.<sup>23</sup> Dalam menggambarkan kerjasama regional Asia Timur-Tenggara, ADB menekankan lebih kepada bersatunya negara-negara di kawasan untuk menghadapi berbagai tantangan dimasa mendatang, salah satu tantangannya adalah krisis finansial. Kawasan Asia Timur-Tenggara yang produktif mempunyai peluang besar untuk berpartisipasi membantu menstabilkan dan memperkuat perekonomian global, sehingga Asia sangat diperlukan untuk mengembangkan kemitraan yang meningkatkan kemakmuran regional dan global.<sup>24</sup>

### 1.3.2 Kepentingan Nasional Terkait Finansial

Sikap maupun keputusan yang diambil oleh sebuah negara merupakan refleksi dari tujuan dan kepentingannya. Kepentingan nasional merupakan tujuan akhir dari sebuah kebijakan, sehingga kepentingan nasional juga dapat diartikan sebagai kebutuhan negara yang bersifat penting yang kemudian mengarahkan para pembuat keputusan dalam merumuskan kebijakan luar negerinya.<sup>25</sup> Sebagai sebuah tujuan, kepentingan nasional menentukan orientasi dan strategi suatu

<sup>23</sup> Robert O Keohane dan Joseph S Nye Jr, "Globalization: What's New? What's Not? (And So What?)", *Foreign Policy* (2000): 105.

<sup>24</sup> Asian Development Bank, *Kebangkitan Regionalisme Asia: Kemitraan dan Kemakmuran Bersama*, (Mandaluyong City, Phil.:Asian Development Bank, 2008), 5.

<sup>25</sup> Anak Agung Banyu Perwita dan Yayan Mochamad Yani, *Pengantar hubungan internasional*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006), 35.

negara. Menurut Dewi Fortuna Anwar, kepentingan nasional mengandung dua pandangan yang saling kontradiktif, yaitu objektif dan subjektif. Pendekatan objektif melihat kepentingan nasional sebagai sesuatu yang bisa didefinisikan secara jelas dengan menggunakan kriteria yang objektif, sehingga rumusan kepentingan nasional suatu negara cenderung konstan dari waktu ke waktu. Sedangkan pendekatan subjektif dalam melihat kepentingan nasional dapat diartikan sesuatu yang selalu berubah mengikuti preferensi para pembuat keputusan.<sup>26</sup>

Penulis melakukan studi pustaka terkait hubungan kepentingan nasional dalam hal finansial dan menemukan tulisan Shaun Narine yang berjudul *The Idea of an "Asian Monetary Fund": The Problems of Financial Institutionalism in the Asia-Pacific*, memaparkan bahwa salah satu penyebab AMF tidak dapat direalisasikan adalah karena peran besar Jepang di Asia tidak disertai dengan kemampuan Jepang untuk memimpin Asia.<sup>27</sup> Menurut Narine, kendala Jepang dalam merealisasikan kerjasama finansial regional dalam kerangka AMF dikarenakan salah satunya adalah adanya masalah *strategic and political tensions* antara negara-negara Asia, khususnya antara Cina dan Jepang, dan antara negara Asia dengan AS<sup>28</sup>. Narine lebih melihat dari sudut pandang Jepang dan mengemukakan bahwa gagalnya AMF adalah dikarenakan penolakan yang dilakukan oleh Cina. Dari aspek historis, Jepang adalah negara penjajah yang menimbulkan banyak penderitaan bagi negara-negara Asia, khususnya Cina dan

<sup>26</sup> Dewi Fortuna Anwar dalam Genewati Wuryandari, *Mencermati Kembali Enam Dekade Politik Luar Negeri Indonesia*, (Jakarta: LIPI, 2007), 14.

<sup>27</sup> Shaun Narine, "The Idea of An "Asian Monetary Fund": The Problems of Financial Institutionalism in the Asia-Pacific," *Asian Perspective* 27, no. 2, (2003):84-93.

<sup>28</sup> Narine, "The Idea of An "Asian Monetary Fund", " 85.

Korea. Sehingga alasan inilah yang membuat Cina menolak proposal AMF karena tindakan Jepang ini menandakan bahwa Jepang memiliki kepentingan nasional yaitu menjadi suatu hegemoni baru di kawasan<sup>29</sup>. Dalam tulisan Narine, terlihat bahwa pasca terjadi krisis finansial Asia, Jepang mulai memasukkan permasalahan finansial ke dalam kepentingan nasionalnya meskipun utamanya kepentingan nasional Jepang memang lebih ke menjadi pemimpin di kawasan<sup>30</sup>. Namun karena keterdekatan Jepang dan negara di kawasan lebih ke kerjasama ekonomi dan disisi lain negara kawasan masih memiliki sistem finansial yang lemah, oleh karena itu solusi yang ditawarkan Jepang dengan membentuk dana moneter Asia diharapkan dapat menjadi alat Jepang untuk mengontrol finansial kawasan seperti AS dengan IMFnya mengontrol finansial dunia.

Sedangkan dalam tulisan Luh Paramitha, Sukma Sushanti, dan Putu Ratih Kumala Dewi yang berjudul "Analisis Perubahan Kebijakan Luar Negeri Cina Melalui Keikutsertaan Cina dalam *Chiang Mai Initiative* sebagai Respon Terhadap Dominasi Jepang di Asia Tenggara", mencoba mengaitkan konsep kepentingan nasional dari pemikiran realis dan teori model aktor rasional untuk melihat perubahan kebijakan luar negeri Cina yang tiba-tiba menjadi sangat kooperatif dengan berbagai bentuk kerjasama di kawasan khususnya kerjasama finansial yaitu CMI.<sup>31</sup> Padahal Cina merupakan negara yang sangat hai-hati terhadap masalah pereonomian apalagi finansial dan moneter, namun ternyata

<sup>29</sup> Narine, "The Idea of An "Asian Monetary Fund", " 88-89.

<sup>30</sup> Narine, "The Idea of An "Asian Monetary Fund", " 91.

<sup>31</sup> Luh Paramitha, Sukma Sushanti, dan Putu Ratih Kumala Dewi, "Analisis Perubahan Kebijakan Luar Negeri Cina Melalui Keikutsertaan Cina dalam *Chiang Mai Initiative* sebagai Respon Terhadap Dominasi Jepang di Asia Tenggara," (Juli 2014): 1-14, <http://id.portalgaruda.org/index.php?ref=browse&mod=viewarticle&article=195985>, (diakses Juli 25, 2015)

alasan perubahan sikap Cina ini dikarenakan Cina memiliki kepentingan menjadi pengaruh dan pemimpin di regional sehingga dapat mengontrol perekonomian regional dan Cina merasa terdapat potensi untuk melakukan internasionalisasi RMB. Oleh karena itu, Cina tidak ingin adanya negara lain yang mendominasi kawasan Asia Timur, dalam tulisan tersebut adalah Jepang.

### 1.3.3 Garis Hubung Kepentingan Nasional dan Upaya Regionalisme dalam Stabilisasi Finansial

Dalam hubungan internasional, interaksi antar negara sering digambarkan dalam bentuk konflik dan kerjasama. Rourke mendefinisikan kerjasama ekonomi sebagai sebuah proses hubungan antar negara, baik secara bilateral maupun multilateral dalam wadah organisasi internasional.<sup>32</sup> Dengan melakukan kerjasama ekonomi, bukan berarti negara-negara yang tergabung didalamnya harus menyerahkan sebagian kedaulatannya. Kerjasama ini justru merupakan suatu strategi untuk mencapai kepentingan nasional bersama dalam menghadapi berbagai tantangan, baik dalam tingkatan regional, maupun tantangan global.<sup>33</sup>

Dalam studi pustaka "A typology of financial instability," Davis menguraikan beberapa kerangka teori yang menjelaskan ketidakstabilan keuangan<sup>34</sup>, yang meliputi (1) teori *debt and financial fragility*, (2) teori *disaster*

<sup>32</sup> John T. Rourke, "International Economic Cooperation: the Alternative Road", dalam *International Politics on the World Stage*, tenth edition, (New York: Mc Graw hill, 2004), 466.

<sup>33</sup> Shinohara, H., "On the Asian Monetary Fund." *Institute for International Monetary Affairs Newsletter* 4. (1999), dalam Pradumna Rana, *Monetary and Financial Cooperation in East Asia, Working Paper Series* No. 6, (Februari 2002) <http://www.hkcpec.org/files/f37.pdf> (diakses Juli 20, 2015).

<sup>34</sup> Philip Davis "A typology of financial instability," *Oesterreichische National Bank Financial Stability Report* 2, (2001): 92-110.

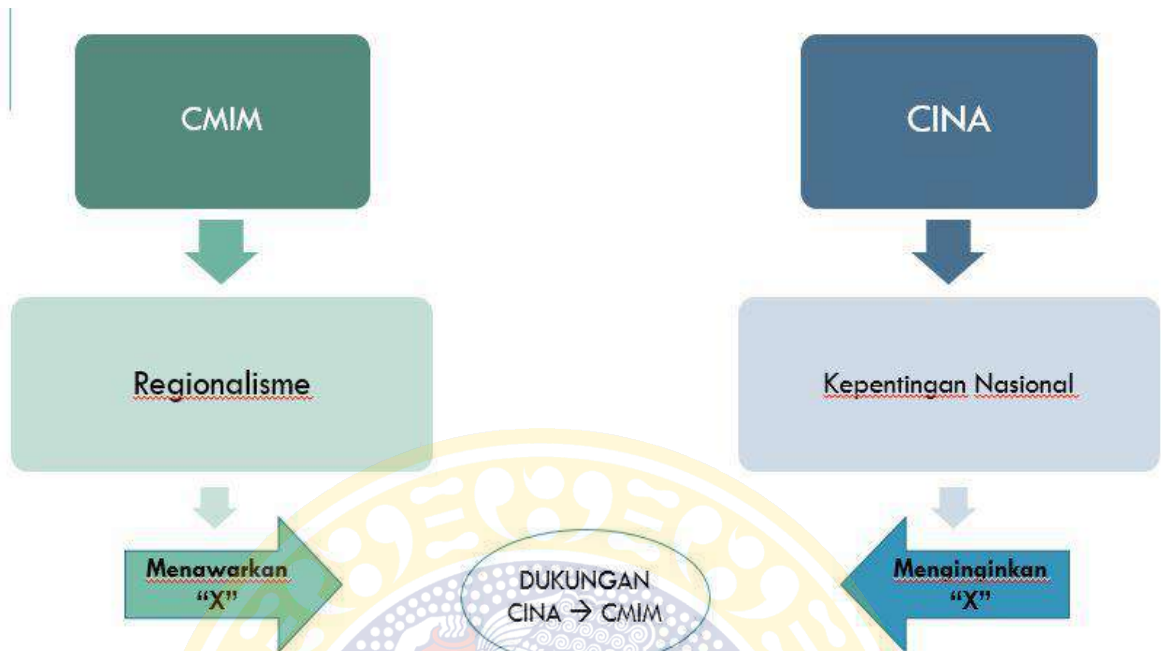


*myopia*, and (3) teori *bank runs*. Sejauh batasannya, ketiga teori ini dapat menjelaskan Krisis Keuangan Asia Timur 1997. Deregulasi keuangan dengan pengawasan peraturan yang tidak memadai menyebabkan gelembung aset yang mengakibatkan pertumbuhan ekonomi negatif dalam perekonomian Asia Timur. Sementara itu, ekspansi yang cepat bisa juga dapat menyebabkan krisis kredit karena kredit yang disalurkan sembarangan ke debitur yang pailit dalam rangka meningkatkan profitabilitas. Terakhir tapi tidak kalah penting, ketika investor menyadari bahwa situasi sudah buruk, mereka menarik dana mereka, yang menyebabkan arus keluar modal yang besar. beberapa literatur menunjukkan bahwa ketidakstabilan keuangan juga bisa disebabkan oleh peran arus modal internasional melalui transmisi internasional, seperti pola perdagangan, tekanan nilai tukar dan investasi asing, yang menyebabkan efek menular.<sup>35</sup>

---

<sup>35</sup> Chongvilaivan, A., "Global Financial Crisis and growth prospects in Asia-Pacific: A sectoral analysis", (2010) *paper presented at The 26th Conference of the American Committee for Asian Economic Studies, Kyoto, Japan, 5-6 March*; Philip Davis "A typology of financial instability," *Oesterreichische National Bank Financial Stability Report 2*, (2001): 92-110.

## SKEMA PEMIKIRAN



Hubungan kerjasama ekonomi antara Cina dengan negara di kawasan Asia Timur-Tenggara sangat dekat khususnya dalam hal perdagangan, sehingga bila terjadi krisis finansial di salah satu negara di kawasan akan menimbulkan efek menular yang sangat cepat ke Cina. Cina yang memiliki kepentingan nasional berfokus pada pertumbuhan dan kesejahteraan ekonomi tentu tidak ingin hal-hal negatif mengganggu perekonomiannya. Dengan adanya regionalisme ekonomi pembentukan bantuan finansial CMIM diharapkan dapat membantu likuiditas negara yang mengalami krisis finansial secara cepat, sehingga aktivitas perekonomian seperti perdagangan di kawasan tetap stabil. Chiang Mai Initiative Multilateralism merupakan sebuah perjanjian finansial kawasan yang telah dibentuk dan disepakati sebagai upaya penanganan krisis secara mandiri di kawasan Asia Timur, dapat dikatakan bahwa Chiang Mai Initiative

Multilateralism memiliki fungsi menjaga kestabilan dan kesinambungan finansial kawasan Asia Timur-Tenggara dan juga sebagai sebuah cara untuk mengatasi krisis keuangan di masa depan.

#### **1.4 Hipotesis**

Hipotesis yang dapat dirumuskan berdasarkan kerangka pemikiran sebelumnya adalah Cina mendukung terbentuknya Chiang Mai Initiative Multilateralisme karena Cina melihat fungsi CMIM sebagai rezim yang dibentuk untuk menanggulangi kesulitan neraca pembayaran dan likuiditas ketika terjadi krisis finansial, dapat mengakomodasi kepentingan Cina untuk menjaga kestabilan finansial kawasan Asia Timur-Tenggara ketika krisis sedang terjadi agar tidak berdampak buruk pada perekonomian Cina.

#### **1.5 Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap apa kepentingan Cina dibalik dukungannya terhadap multilateralisasi Chiang Mai Initiatives Multilateralisme yang berfungsi membantu permasalahan likuiditas negara-negara di kawasan Asia Timur-Tenggara apabila terjadi krisis.

## 1.6 Metodologi Penelitian

### 1.6.1 Definisi dan Operasionalisasi Konsep

#### 1.6.1.1 Krisis Finansial

Istilah krisis finansial digunakan untuk berbagai situasi dengan berbagai institusi atau aset keuangan kehilangan sebagian besar nilainya. Pada abad ke-19 dan ke 20, banyak krisis finansial berhubungan dengan kepanikan perbankan dan resesi. Situasi lain yang sering disebut sebagai krisis finansial adalah runtuhnya bursa efek dan krisis mata uang. Krisis finansial umumnya ditandai dengan terjadinya depresiasi nilai tukar yang tajam. Berbagai kriteria dan metode digunakan untuk menilai, kapan sebuah depresiasi, sehingga memunculkan krisis. Frankel dan Rose mengatakan krisis nilai tukar didefinisikan sebagai perubahan besar pada beberapa indikator pada nilai aktual dan potensial dari sebuah mata uang. Maka dari itu, harus diteliti episode depresiasi besar-besaran tersebut, kapan otoritas mampu menahan dan kapan tidak. Dalam situasi seperti apa mereka muncul, dan faktor apa yang menyebabkan situasi menjadi sulit dikendalikan.<sup>36</sup> Krisis finansial memiliki arti yaitu ketidakseimbangan ekonomi suatu negara yang mengakibatkan menurunnya nilai mata uang. Namun diantara keduanya memiliki perbedaan.<sup>37</sup> Krisis finansial dalam penelitian ini adalah krisis finansial 1997-1998 yang terjadi di Asia dan krisis global di tahun 2008.

---

<sup>36</sup> A. Prasetyantoko, *Bencana Finansial: Stabilitas sebagai Barang Publik*, (Jakarta: Buku Kompas, 2008), 12.

<sup>37</sup> A. Prasetyantoo, *Bencana Finansial*, 12.

### 1.6.1.2 Kepentingan Cina

Kepentingan dapat didefinisikan sebagai alat atau cara bagi suatu negara untuk mempertahankan eksistensinya dalam rangka mencapai tujuan negaranya. Dalam memenuhi kepentingannya, rezim atau organisasi internasional menjadi salah satu strategi bagi negara untuk mewujudkan kepentingan sehingga menghasilkan keuntungan yang semaksimal mungkin. Selain itu, partisipasi dalam rezim internasional dapat mempermudah negara dalam mempengaruhi aktor negara atau aktor-aktor internasional lainnya. Keohane dan Nye berargumen, *“Define regimes as a sets of governing arrangements that include networks of rules, norms and procedures that regulize behaviour and control its effect”* dan *“Institutions possessing norms, decision rules, and decisionmaking procedures which facilitate a convergence of expectations”*.<sup>38</sup> Dalam berjalannya sebuah sistem, rezim akan menghasilkan *output* ataupun sikap dari anggota rezim sebagai keputusan bersama.

Keputusan bersama tersebut merupakan kumpulan dari upaya setiap negara dalam memaksimalkan kepentingan serta kekuatannya masing-masing. Kepentingan Cina dalam penelitian ini mengacu pada upaya Cina menjaga stabilitas finansial kawasan Asia Timur-Tenggara agar perdagangan kawasan dapat terus berjalan dan tidak berdampak buruk pada perekonomian negaranya.

---

<sup>38</sup> Robert O. Keohane, *“After Hegemony: Cooperation and Discord in the World Political Economy,”* (United Kingdom: Princeton University Press, 1984), hal. 59.

### 1.6.2 Tipe Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian eksplanatif,<sup>39</sup> yaitu metode pemecahan masalah yang mengkaitkan antara dua variabel maupun lebih yang bertujuan untuk mencari penjelasan atas hubungan yang terjadi antar fenomena, dan dibentuk dalam suatu hipotesis. Variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah variabel terikat dan bebas. Variabel terikat adalah variabel yang dipengaruhi atau menjadi akibat dari variabel bebas, sedangkan variabel bebas adalah variabel yang memengaruhi atau menjadi sebab bagi perubahan yang terjadi pada variabel terikat. Metode ini berusaha mengumpulkan dan menyusun data yang diperlukan kemudian menganalisis data dari fenomena tersebut. Pada penelitian kali ini menjelaskan dan menganalisis “apa yang mendorong Cina mendukung Chiang Mai Initiative Multilateralism” secara sistematis dan faktual.

### 1.6.3 Ruang Lingkup dan Jangkauan Penelitian

Penelitian ini mengambil ruang lingkup dari tahun 1997 hingga 2010. Jangkauan ini dipilih karena pada tahun 2010, Chiang Mai Initiative Multilateralism telah ditandatangani dan mulai beroperasi secara resmi. Dengan menganalisis hubungan Cina dengan negara kawasan pada jangkauan 13 tahun antara tahun 1997-2010 tersebut, lebih mudah ditemukan kepentingan apa yang ingin dicapai oleh Cina dibalik dukungannya terhadap proses pembentukan Chiang Mai Initiative Multilateralism (CMIM).

---

<sup>39</sup> Prof.Dr, Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2013), 393.

#### **1.6.4 Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data adalah cara yang digunakan untuk menghimpun data, informasi, atau fakta yang berhubungan dan relevan dengan masalah yang hendak diteliti.<sup>40</sup> Dalam penelitian ini, data yang disajikan merupakan data sekunder yang diperoleh melalui tinjauan pustaka, yakni dengan mengumpulkan data-data yang relevan dengan permasalahan yang dibahas dari literatur seperti buku, jurnal, dan juga situs-situs dari internet yang terpercaya.

#### **1.6.5 Teknik Analisis Data**

Analisis data dalam penelitian apapun merupakan cara berpikir dari penulis. Hal itu berkaitan dengan pengujian secara sistematis terhadap sesuatu untuk menentukan bagian, hubungan antar bagian, dan hubungannya dengan keseluruhan. Analisis juga digunakan untuk mencari pola.<sup>41</sup> Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik analisis data kualitatif, di mana penulis akan menganalisis segala informasi yang didapatkan dari data sekunder dalam bentuk kalimat dan jika menggunakan analisis data berupa angka maka analisis tersebut hanya digunakan untuk mendukung pernyataan penulis.

---

<sup>40</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan*, 193.

<sup>41</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan*, 335.

## 1.7 Sistematika Penulisan

Penelitian ini dikembangkan kedalam lima bagian pembahasan yang terdiri atas:

Bab 1, Pendahuluan, yang terdiri dari latar belakang penelitian, rumusan masalah, kerangka pemikiran, hipotesis, dan metode penelitian.

Bab 2, membahas tentang kepentingan ekonomi Cina dan kebijakan yang diambil oleh Cina saat terjadi krisis finansial, hubungan Cina dan negara-negara dikawasan Asia Timur-Tenggara dan pentingnya negara-negara di kawasan di mata Cina

Bab 3, membahas tentang proses terbentuknya Chiang Mai Initiative Multilateralism dan respon Cina terhadap usulan dibuatnya Chiang Mai Initiative Multilateralism

Bab 4, berisikan analisis penjelasan terkait kepentingan ekonomi Cina dengan apa yang ditawarkan oleh CMIM sehingga dapat tercipta kestabilan finansial negara-negara di kawasan Asia Timur-Tenggara.

Bab 5, Penutup yang berisi kesimpulan. Kesimpulan merupakan intisari hasil analisis dan interpretasi. Cara penulisan kesimpulan ini adalah dalam bentuk pernyataan secara ketat dan padat, sehingga tidak menimbulkan penafsiran yang lain. Bab penutup ini sekaligus menjadi jawaban dari rumusan masalah dan pembuktian hipotesis yang dibuat oleh peneliti pada Bab 1.